



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) SETDA KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2023**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN
2023**



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, sehingga Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah

Kabupaten Buleleng Tahun 2023, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansial Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng, adalah sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan melaksanakan misi, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, dan visi Pemerintah Kabupaten Buleleng.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG *Tahun 2023*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 juga merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026. Laporan ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2023 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk menyempurnakan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Singaraja, 8 Januari 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Drs. Gede Suyasa, M.Pd

NIP. 19670710 199203 1 014



RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil sesuai dengan kewenangannya. Manajemen pemerintahan yang baik memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas Kinerja setidaknya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sebagai gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan misi dan mewujudkan visi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan pengukuran kinerja atas 2 Sasaran dengan 4 Indikator Kinerja sasaran maka diperoleh nilai capaian indikator kinerja dan nilai rata-rata capaian sasaran strategis. Supaya nilai-nilai capaian itu bermakna, maka nilai-nilai itu diberi predikat. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja, maka tahun ini standar nilai ditingkatkan untuk mendapatkan predikat tertentu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100	:	Sangat Berhasil
76 s/d 90	:	Berhasil
61 s/d 75	:	Cukup Berhasil
46 s/d 50	:	Kurang Berhasil
0 s/d 45	:	Sangat Kurang Berhasil

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan sebagai berikut.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	
76- 90	Berhasil	
61- 75	Cukup Berhasil	
46- 60	Kurang	
0-45	Sangat Kurang	

Berdasarkan pemberian predikat atas nilai rata-rata capaian sasaran tahun ini, maka predikat 2 sasaran yang berhasil diraih tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil		
2	Berhasil	2	82,20
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	2	82,20

Berdasarkan pemberian predikat atas capaian indikator kinerja, maka predikat 4 indikator kinerja adalah sebagai berikut.

No	Predikat	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil		
2	Berhasil	4	82,20
3	Cukup		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	4	82,20

Dilihat dari Capaian 4 Sasaran secara umum juga Berhasil, yaitu 82,20 %.

Pencapaian capaian kinerja tersebut karena ada komitmen membangun pemerintah yang memuaskan dengan akuntabel serta sinergi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Buleleng. Kekurangan, kelemahan capaian yang Kurang Berhasil dan bahkan yang Sangat Kurang Berhasil



akan menjadi referensi dalam perbaikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja ke depan.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi	3
1.4 Isu Strategis	3
1.5 Struktur Organisasi	4
1.6. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	9
2.1. RPJMD DAN RENSTRA ORGANISASI 2023-2028	9
2.1.1 Pernyataan Tugas dan Fungsi	9
2.2. Indikator Kinerja dan IKU.	10
2.3. Perjanjian Kinerja.	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
3.1 Kerangka Pengukuran	23
3.2 Capaian Kinerja	25
3.2.1 Capaian Kinerja Utama	26
3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran	27
3.3. Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis	29
3.4. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV PENUTUP	49
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

Bab I Memuat

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Umum Organisasi
- 1.4 Isu Strategis
- 1.5 Struktur Organisasi
- 1.6 Sistematika Penyajian

1.1 Latar Belakang

Mengacu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terstruktur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Pemerintahan yang baik merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menyediakan barang-barang dan jasa-jasa publik (*public goods and services*). Pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Upaya mewujudkan pemerintahan yang baik, yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik dan integritas, profesionalitas serta etos kerja dan moral yang tinggi.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG *Tahun 2023*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Selain itu, LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang baik. Dalam persepektif yang lebih luas, LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Kewajiban membuat LKjIP dapat mendorong terselenggaranya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Sebaliknya, LKjIP yang baik haruslah didahului dengan tercapainya secara baik sasaran kinerja instansi pemerintah sesuai perencanaan, rencana jangka menengah lima tahunan, rencana tahunan, dan perjanjian kinerja. Capaian kinerja sesuai rencana itulah yang merupakan inti LKjIP. Tidak mungkin dibuat LKjIP yang baik kalau kinerja instansi pemerintah tidak mampu mencapai sasaran dengan baik sesuai rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 ini disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan memerhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Realisasi yang dilaporkan dalam LKjIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2023 yang merupakan kinerja tahun **pertama** pelaksanaan RPJMD tahun 2023-2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026. LKjIP Tahun 2023 ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD dan RENSTRA, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasannya yang memadai atas kinerja, dan perbandingan capaian indikator kinerja.

1.2 Maksud dan Tujuan

LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

Selain itu, LKJIP menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKJIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKJIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1.3.1 Kondisi Demografis

Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dipimpin oleh Sekretaris Daerah dengan 3 Asisten, yaitu Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan (Asisten I), Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) serta Asisten Administrasi Umum (Asisten III).

Adapun rincian jumlah dan komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dapat diuraikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah dan Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng
Tahun 2023

No.	Pegawai>Nama/NIP	Laki	Perempuan	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	PNS	80	58	138
B.	HONOR DAERAH	4	3	7
C.	KONTRAK	156	148	304
JUMLAH				449

Sumber: Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

1.4 Isu-Isu Strategis

Secara umum isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan RPJMD 2023-2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

- Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Masih rendahnya harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

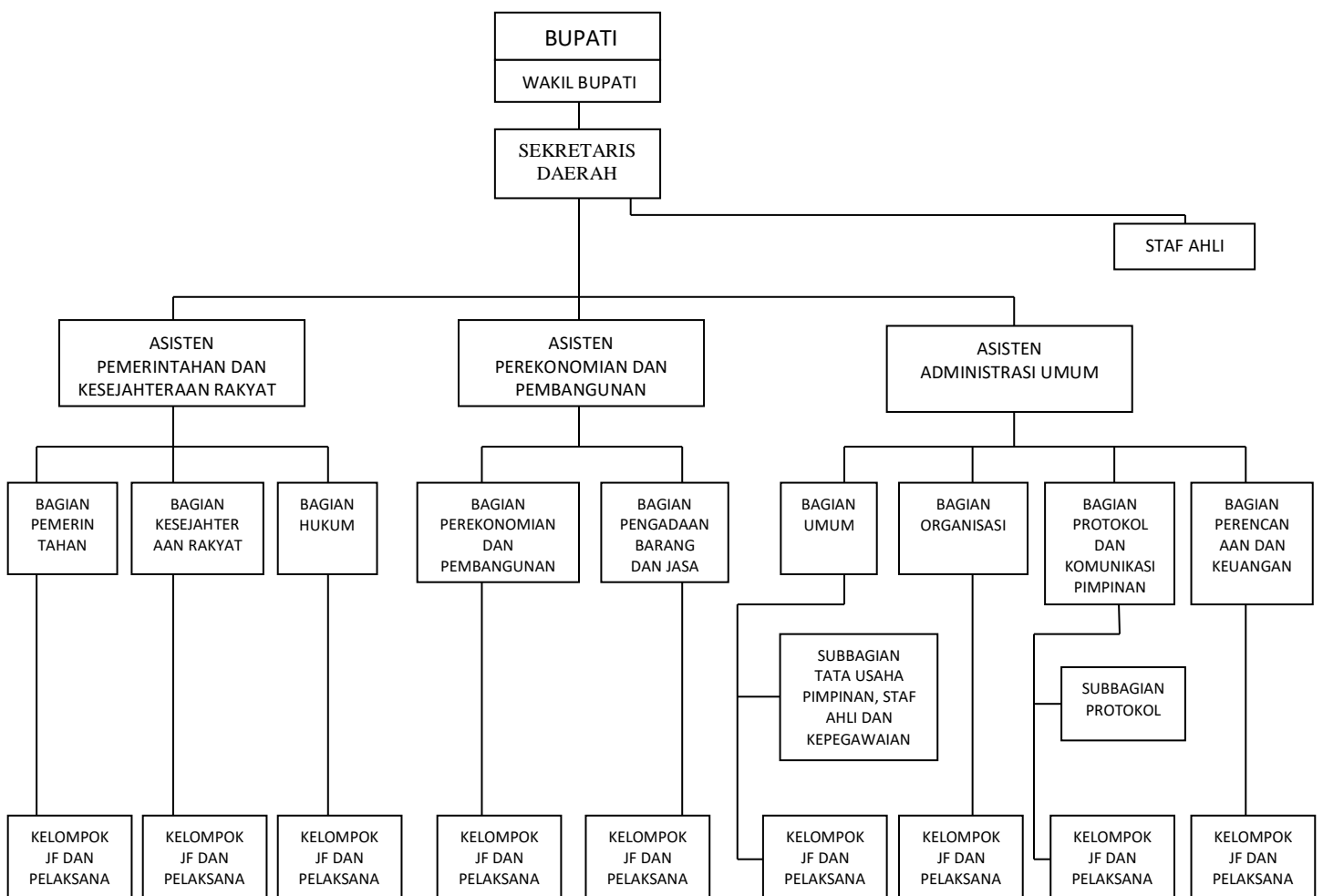


LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

- c. Belum optimalnya kualitas kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik;
- e. Masih belum meratanya kesejahteraan rakyat Pemerintah Daerah;
- f. Belum optimalnya kualitas administrasi pembangunan;
- g. Masih rendahnya layanan pengadaan barang/jasa Pemerintah;
- h. Belum optimalnya laporan keuangan Sekretariat Daerah;
- i. Belum optimalnya pendataan dan pengelolaan aset Sekretariat Daerah;
- j. Masih rendahnya publikasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa;

1.5 Struktur Organisasi.

Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng disajikan pada Gambar 1.1



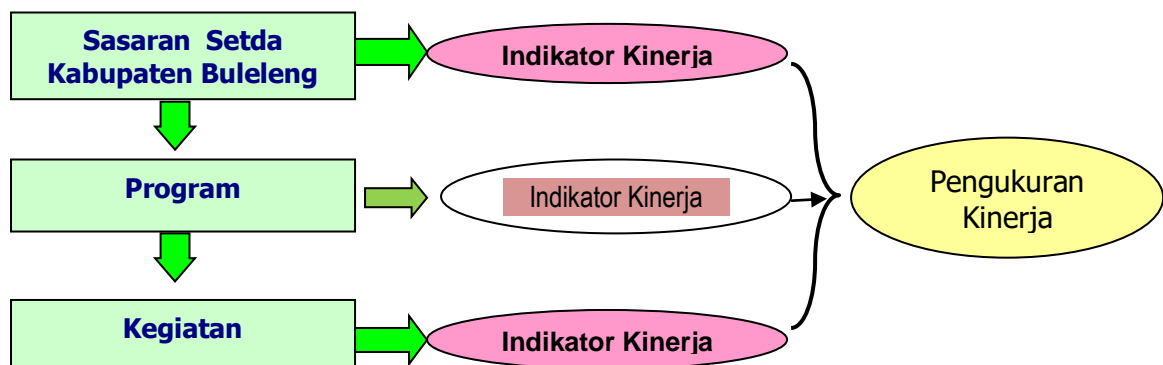


Rincian dari Susunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sesuai dengan gambar 1.1 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) membawahi :
 - Bagian Pemerintahan;
 - Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - Bagian Hukum;
- c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) membawahi :
 - Bagian Perekonomian dan Pembangunan;
 - Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa;
- d. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) membawahi :
 - Bagian Umum membawahi subbagian tata usaha pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - Bagian Organisa;
 - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, membawahi subbagian protokol;
 - Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

1.6 Sistematika Penyajian

LKjIP adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis organisasi yang berkaitan dengan visi dan misi organisasi melalui berbagai program dan kegiatan tahunan. Alur pikir pengukuran kinerja pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Buleleng mengikuti alur pikir sebagaimana disajikan dalam Gambar 1 2.





Gambar 1.2. Alur Fikir Pengukuran Kinerja

Sistematika LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disusun dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

BAB I PENDAHULUAN.

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (Strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.

Pada bab II pada intinya diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

Pada bab III diuraikan (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (Jika ada)
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan



- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

(2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP.

Pada bab IV diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II Memuat

2.1 RPJMD dan RENSTRA Organisasi

2.1.1 Pernyataan Tugas dan Fungsi

2.2 Indikator Indikator Kinerja Utama

2.3 Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran Tahun 2023

2.1 RPJMD Kabupaten Buleleng dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng 2023- 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan pembangunan dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun. RPJMD dan RENSTRA berisi penjabaran Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), serta memuat Arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Arah Kebijakan Umum, Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Lintas SKPD dan Program Kewilayahan disertai dengan Rencana Kerangka Regulasi dan Pendanaannya secara indikatif.

Pemerintah Kabupaten Buleleng telah menetapkan RPJMD melalui Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 untuk periode tahun 2023-2026. Berikut disajikan beberapa komponen RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023-2026 terutama Pernyataan Tugas dan Fungsi.

2.1.1 Pernyataan Tugas dan Fungsi

Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan daerah dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.



Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
- 3) Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- 4) Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 telah menyediakan ukuran keberhasilan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Indikator kinerja tahun 2023 yang memuat indikator kinerja, satuan ukur, dan target tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target 2023
1	2	3
1	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	90%
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	69,15 Nilai

Indikator Kinerja Utama (IKU) menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng, untuk tahun 2023-2026 telah menyusun IKU yang memuat: Kinerja Utama, Indikator Kinerja Utama, Instansi Penanggungjawab, dan Sumber Data, yang disajikan pada Tabel 2.4. Indikator Kinerja Utama selengkapnya yang memuat formula pengukuran terlampir pada lampiran 1.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG *Tahun 2023*

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

No.	Kinerja Utama atau Tujuan/Sasaran Strategis/Hasil (outcome)	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan			Keterangan/Kriteria
				Alasan	Formulasi/Cara Pengukuran	Sumber Data	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya kualitas layanan publik	Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	Persentase (%)	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)	Jumlah SKPD Yang Nilai IKM Baik Dibagi Jumlah Keseluruhan SKPD Dikali 100	Bagian Organisasi	Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.



LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Nilai	Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Daerah	Bagian Organisasi, Penyerahan nilai hasil evaluasi AKIP Daerah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	5 komponen penting yang menjadi obyek evaluasi, yaitu : (1) Perencanaan Kinerja (30), (2) Pengukuran Kinerja (25), (3) Pelaporan Kinerja (15), (4) Evaluasi Kinerja (10%) dan (5) Pencapaian Kinerja (20)

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja untuk mewujudkan target yang ingin dicapai berdasarkan sumber daya alam yang dimiliki dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (RENSTRA). Perjanjian kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023 ditetapkan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2023-2026, dokumen RENSTRA dan IKU Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023, disajikan pada Tabel 2.5, beserta program dan anggaran tabel 2.6



LKIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Kinerja Utama/Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Katagori Baik	%	90
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	Nilai	69,15
3.	Terkoordinasinya Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Laporan Koordinasi Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan Daerah dan Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah	Laporan	12

Tabel 2.6
Program dan Anggaran untuk Merealisasikan Perjanjian Kinerja

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	2	3	
1.	Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	2.294.215.600	APBD 2023
		6.226.943.400	APBD 2023
		1.872.307.800	APBD 2023
2.	Perekonomian dan Pembangunan	1.985.969.300	APBD 2023
		1.100.663.000	APBD 2023
3.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	23.580.070.474	APBD 2023
		861.795.000	APBD 2023
		22.067.673.725	APBD 2023
		6.474.419.100	APBD 2023
J U M L A H		66.464.057.299,-	APBD 2023

Sumber : LRA Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Singaraja, 31 Desember 2023



LKjIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG *Tahun 2023*



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab III Memuat

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

3.2 Capaian Kinerja

3.2.1 Capaian Kinerja Utama

3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran

3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran

Strategis

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Mengacu Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bab III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini substansinya memuat: (1) Capaian Kinerja Organisasi, pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut: (a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; (b) Membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; (c) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; (d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); (e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; (f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; (g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. (2) Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi instansi pemerintah.



Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Capaian kinerja dihitung dengan formulasi tertentu sebagai berikut.

- 1) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin baik**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang **semakin buruk**, dihitung dengan formula:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Formulasi (2) digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator kinerja angka pengangguran, angka kematian dan sejenisnya.

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan predikat tertentu tahun ini dibutuhkan angka capaian lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut.

91 s/d 100 : Sangat Berhasil

76 s/d 90 : Berhasil

61 s/d 75 : Cukup Berhasil

46 s/d 60 : Kurang



0 s/d 45 : Sangat Kurang

Predikat nilai capaian kinerja tahun ini dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Angka Capaian	Predikat	Warna
1	2	3
91-100	Sangat Berhasil	Blue
76- 90	Berhasil	Light Blue
61- 75	Cukup Berhasil	Yellow
46- 60	Kurang	Orange
0-45	Sangat Kurang	Red

Dari perbandingan pemberian predikat atas capaian kinerja tahun lalu dan tahun ini menunjukkan, untuk mendapat predikat Sangat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 85-100. Sedangkan tahun ini untuk mendapatkan predikat Sangat Berhasil dibutuhkan angka capaian 91-100. Demikian juga untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun lalu dibutuhkan angka capaian 70-<85. Sedangkan untuk mendapatkan predikat Berhasil tahun ini dibutuhkan angka capaian 76-90. Meningkatkan standar untuk mencapai predikat ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja.

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.

Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi yang disajikan dalam capaian kinerja organisasi yang menggunakan ukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang indikator kerjanya menggunakan Indikator Kinerja Utama.



3.2.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng

Hasil pengukuran atas indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2023 menunjukkan hasil disajikan pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Capaian S/d 2022 Terhadap Target 2023
1	2	6		7
Nilai LPPD	Nilai/Angka	4.20	4.21	4.21
Persentase produk hukum daerah yang harmonis dengan Peraturan Perundang-Undangan	%	100		100
Nilai AKIP Daerah	Nilai/Angka	68,58	70	68,73
Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	%	83	90	85,75
Persentase pengajuan proposal Bansos/Hibah yang ditindaklanjuti	%	100		100
Persentase SKPD yang menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tepat waktu	%	100		100
Persentase penetapan pemenang lelang/seleksi	%	100		117
Persentase laporan keuangan sekretariat daerah yang diselesaikan tepat waktu	%	100		100
Persentase aset milik daerah dalam kondisi baik	%	100		100
Persentase layanan publikasi pembangunan, pemerintahan dan masyarakat melalui media massa	%	100		100



3.2.2 Capaian Kinerja Sasaran dengan Indikator Sesuai Perjanjian Kinerja

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran beserta capaian indikator kinerja disajikan pada lampiran 2. Sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran beserta predikat yang diperoleh, disajikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata Capaian	0-45	46-60	61-75	76-90	91-100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>
2.	Terwujudnya harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>
3.	Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	2	100					<i>Sangat Berhasil</i>
4.	Meningkatnya tingkat kesejahteraan rakyat Pemerintah Daerah	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>
5.	Terwujudnya pembangunan daerah yang tepat waktu	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>
6.	Meningkatnya layanan lelang/seleksi pengadaan barang/jasa Pemerintah	1	117					<i>Sangat Berhasil</i>
7.	Meningkatnya kualitas laporan keuangan sekretariat daerah	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>
8.	Meningkatnya pengelolaan aset Sekretariat Daerah	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>
9.	Meningkatnya publikasi pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan melalui media massa	1	100					<i>Sangat Berhasil</i>



Untuk mengetahui secara cepat jumlah sasaran maupun indikator untuk masing-masing Predikat maka tabel 3.3 di atas dapat diresum menjadi tabel 3.4

Tabel 3.4
Resume Predikan Capaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase
1	2	3	4
1	Sangat Berhasil		
2	Berhasil	2	82,20
3	Cukup Berhasil		
4	Kurang		
5	Sangat Kurang		
	Jumlah	2	82,20



3.3 Evaluasi Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 1, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Satu indikator diperoleh nilai rata-rata capaian 100 % termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 1, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
1. Persentase Perangkat Daerah dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) baik	83	90	85,75	85,75	85,75
2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah	68,58	70	68,73	68,73	68,73
Rata-rata capaian					

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 1, dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2023 untuk satu indikator sesuai dengan target tahun 2023 dan termasuk katagori Sangat Baik.
2. Realisasi tahun 2023 untuk satu indikator melebihi realisasi tahun 2022.
3. Realisasi tahun 2023 juga sudah sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2023.
4. Interval penilaian LPPD dalam ekppd adalah 0-4 dimana bobot nilai 0-1:rendah, 1-2:sedang, 2-3:tinggi dan 3-4:sangat tinggi. Untuk target 2023 nilai : 3,2 (3,24).



Capaian Sasaran 1, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik, dicapai melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng dengan jumlah anggaran Rp.2.294.215.600,- dan realisasi anggaran Rp. 1.911.388.844,- (83,31%).

Capaian Sasaran 1 tahun 2023 yang sesuai dengan target, yaitu mencapai rata-rata 92,40% dan realisasi anggaran 83,31% menunjukkan adanya efisiensi. Hasil realisasi anggaran sasaran 1, Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	2	3	4	5	6
1. Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	71,56	2.294.215.600	1.911.388.844	83,31	82,31
Rata-rata capaian					

Meskipun capaian kinerja Sasaran 1 termasuk **Sangat Berhasil**, masih ada kendala yang dihadapi yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Melaksanakan bimbingan teknis terkait penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2017 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.



2. Membentuk Tim Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Buleleng No. 130/70/HK/2019 Tentang TIM Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023.
3. Secara intens melaksanakan evaluasi terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah.

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 2, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik dengan satu indikator kinerja diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja 100 % termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 2, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik disajikan berikut :

Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
2. Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	95,90	6.226.943 .400	5.883.968 .216	94,49	93,49
Rata-rata capaian					

Dari pengukuran kinerja Sasaran 2 di atas ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2023 dari satu indikator kinerja telah sesuai dengan target tahun 2023 dan termasuk katagori Sangat Baik.
2. Realisasi tahun 2023 dengan satu indikator kinerja sama dengan realisasi tahun 2022.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023, untuk satu indikator kinerja sudah sesuai dengan realisasi tahun 2023.



4. Produk hukum daerah adalah suatu hasil hukum daerah berupa Ranperda dan Perda.

Capaian Sasaran 2 dicapai melalui Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat dengan anggaran pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Buleleng Rp. 6.226.943.400,- dan realisasi anggaran Rp. 5.883.968.216,- (94.49%).

Capaian Sasaran 2 tahun 2023 yang sesuai dengan target, yaitu mencapai rata-rata 100,00% dan realisasi anggaran 94,49% menunjukkan adanya efisiensi.

Sasaran 3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik

Capaian Sasaran 3, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik, dicapai melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng dengan jumlah anggaran Rp.1.872.307.800,- dan realisasi anggaran Rp. 1.653.497.905,- (88,31%).

Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
3. Pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	89,18	1.872.307.800	1.653.497.905	88,31	87,31
Rata-rata capaian					

Meskipun capaian kinerja Sasaran 2 termasuk **Sangat Berhasil**, masih ada kendala yang dihadapi yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Masih rendahnya harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemahaman masyarakat akan hak dan Kewajiban serta aturan hukum yang berlaku masih rendah;



3. Perubahan produk hukum pusat yang begitu cepat sehingga mempengaruhi lancarnya arus informasi hukum dan kurang mencerminkan kepastian hukum.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Buleleng terus-menerus melaksanakan Koordinasi dan kerjasama guna menghadapi Permasalahan Hukum.
2. Melaksanakan Sosialisasi Perda ke Kecamatan/Lurah/Desa yang ada di Kabupaten Buleleng.
3. Mengadakan pengkajian dan penyesuaian produk hukum daerah guna memperlancar jalannya pemerintahan.

Sasaran 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 4, Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik dengan dua indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 100 % termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 4, Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik disajikan berikut :

Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2022			Capaian 2022 Thd 2023 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
4. Perekonomian dan Pembangunan	95,63	1.985.969.300	1.867.056.100	94,01	93,01
Rata-rata capaian					

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 4 di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.



1. Realisasi tahun 2023 untuk dua indikator, sesuai dengan target yang ditetapkan dan termasuk kategori sangat baik.
2. Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2023, dua indikator melampaui realisasi tahun 2022.
3. Dibandingkan dengan target realisasi tahun 2023, dengan dua indikator kinerja sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2023.
4. 5 komponen penting yang menjadi obyek evaluasi, yaitu : (1) Perencanaan Kinerja (30), (2) Pengukuran Kinerja (25), (3) Pelaporan Kinerja (15), (4) Evaluasi Kinerja (10%) dan (5) Pencapaian Kinerja (20).
5. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Capaian Sasaran 4, Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik dicapai melalui Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Rp. 1.985.969.300,- dan realisasi Rp. 1.867.056.100,- (94,01%).

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik

Capaian Sasaran 5 tahun 2023 yang sesuai dengan target, melalui Program Perekonomian dan Pembangunan dengan anggaran pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng Rp. 1.100.663.000,- dan realisasi Rp. 1.002.111.348,- (91,05%).



yaitu mencapai rata-rata 100,00% dan realisasi anggaran 91,05% menunjukkan adanya efisiensi. Hasil realisasi anggaran sasaran 5, Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2021 (%)	Tahun 2022			Capaian 2022 Thd 2023 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
5. Perekonomian dan Pembangunan	95,44	1.100.663.000	1.002.111.348	91,05	90,05
Rata-rata capaian					

Meskipun capaian kinerja Sasaran 5 termasuk **Sangat Berhasil**, masih ada kendala yang dihadapi yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Pemahaman SKPD terhadap TUPOKSI perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga nantinya tidak terjadi saling lempar tanggung jawab.
2. Reformasi Birokrasi (RB), ANJAB dan ABK belum berjalan sesuai harapan.
3. Penerapan Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klarifikasi Cabang Dinas dan UPTD, sehingga ada beberapa jabatan struktural yang dihapus.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Secara intens melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap TUPOKSI di masing-masing SKPD
2. Membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB), ANJAB dan ABK dan menyusun PERBUP Road Map RB, ANJAB dan ABK.



3. Melakukan evaluasi dan melakukan kajian terkait pembentukan UPTD sesuai amanat Permendagri No. 12 Tahun 2017 serta melaksanakan koordinasi dengan BKPSDM terkait pengelolaan terhadap pejabat struktural yang terkena dampak dengan pemberlakuan Permendagri dimaksud.

Sasaran 6. Terpenuhiya jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 6, Terpenuhiya jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dengan satu indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 100 % termasuk katagori **Sangat Berhasil**.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 6, Terpenuhiya jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan disajikan berikut :

Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
6. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95,03	23.580.07 0.374	22.923.119. 463	97,21	96,21
Rata-rata capaian					

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 6, di atas dapat ditarik simpulan berikut :

1. Realisasi tahun 2023 dengan satu indikator kinerja telah sesuai dengan target tahun 2023 dan termasuk kategori sangat baik. .
2. Dibandingkan realisasi tahun 2022, dengan satu indikator kinerja sama dengan realisasi tahun 2023.



3. Realisasi tahun 2023 dengan satu indikator kinerja sudah sesuai dengan target akhir RPJMD tahun 2023.
4. Proposal adalah suatu bentuk pengajuan atau permohonan baik berupa ide, gagasan, pemikiran maupun rencana kepada masyarakat berupa Bansos atau Hibah.

Capaian Sasaran 6, Terpenuhinya jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Buleleng Rp. 23.580.070.374,- dan realisasi Rp. 22.923.119.463,- (97,21%).

Sasaran 7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik

Capaian Sasaran 7 tahun 2023 yang sesuai dengan target, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng Rp. 861.795.000,- dan realisasi Rp. 727.683.642,- (84,44%), yaitu mencapai rata-rata 100,00% dan realisasi anggaran 84,44% menunjukkan adanya efisiensi. Hasil realisasi anggaran sasaran 7, Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik adalah sebagai berikut :

Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
7. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	86,93	861.795.000	727.683.642	84,44	83,44
Rata-rata capaian					



Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2022	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023
		Target	Target Realisasi	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
1. Nilai AKIP Daerah	68,58	70	68,73	68,73	68,73
2. Persentase SKPD dengan nilai IKM baik	83	90	85,75	85,75	85,75
Rata-rata capaian					

Meskipun capaian kinerja Sasaran 7 termasuk **Sangat Berhasil**, masih ada kendala yang dihadapi yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Masih belum meratanya kesejahteraan rakyat di Kabupaten Buleleng.
2. Masih kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai petugas lapangan yang membantu Orang Dengan HIV AIDS (ODHA) dalam pendampingan.
3. Terkendalanya peserta Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi Bali.
4. Kurangnya jumlah peserta pemberdayaan sosial kemasyarakatan dan singkatnya waktu pelaksanaan.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Secara intens melakukan sosialisasi dan evaluasi terhadap proposal hibah bansos.
2. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pelatihan terhadap petugas lapangan yang bertugas membantu Orang Dengan HIV AIDS dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
3. Menyusun jadwal untuk lomba Utsawa Dharma Gita dan secara intens melaksanakan pembinaan terhadap peserta untuk lomba Utsawa Dharma Gita Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi.
4. Secara intens melakukan sosialisasi dan pembinaan peserta pemberdayaan masyarakat.



Sasaran 8. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Hasil evaluasi capaian kinerja Sasaran 8, melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng Rp. 22.067.673.725,- dan realisasi Rp. 19.101.985.898,- (86,56%), Terwujudnya pembangunan Daerah yang tepat waktu dengan satu indikator diperoleh nilai rata-rata capaian kinerja sasaran 100 % termasuk katagori **Sangat Berhasil**. Hasil pengukuran capaian kinerja Sasaran 8, Terwujudnya pembangunan Daerah yang tepat waktu disajikan berikut :

Bagian Umum Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023
		Target	Realisasi	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80,19	22.067.673. 725	19.101.98 5.898	86,56	85,19
Rata-rata capaian					

Dari pengukuran capaian kinerja Sasaran 8 di atas dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Realisasi tahun 2022 untuk satu indikator sudah sesuai dengan target yang ditetapkan dan termasuk kategori sangat baik.
2. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dengan satu indikator kinerja sudah sesuai dengan realisasi tahun 2023.
3. Dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2023, realisasi tahun 2022 dengan satu indikator kinerja sudah sesuai dengan target tahun 2023.
4. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.



Sasaran 9. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

Capaian Sasaran 9, Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik yang baik dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng Rp. 6.474.419.100,- dan realisasi Rp. 6.199.718.544,- (95,76%).

Capaian Sasaran 9 tahun 2023 yang sesuai dengan target, yaitu mencapai rata-rata 100,00% dan realisasi anggaran 95,76% menunjukkan adanya efisiensi. Hasil realisasi anggaran sasaran 9, Terwujudnya pembangunan Daerah yang tepat waktu adalah sebagai berikut :

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Buleleng

Program	Realisasi 2022 (%)	Tahun 2023			Capaian 2022 Thd 2023 (%)
		Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian %	
1	5	6	7	8	9
9. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	97,39	6.474.419.100	6.199.718.544	95,76	94,76
Rata-rata capaian					

Meskipun capaian kinerja Sasaran 6 termasuk **Sangat Berhasil**, masih ada kendala yang dihadapi yang sudah klasik, sebagai berikut .

1. Belum optimalnya kualitas administrasi pembangunan.

Langkah-langkah yang sudah dilakukan dan perlu dilanjutkan ke depan untuk mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan rekanan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap semua kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait dengan pembangunan fisik.



LKjIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG *Tahun 2023*

3. Melaporkan kepada Kepala Daerah tentang hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi fisik dari semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Asisten Administrasi Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng.



1.4 Akuntabilitas Keuangan

Pengelolaan belanja daerah selama tahun 2023, menghasilkan efisiensi pengeluaran sebesar 92,19 %. yaitu dari anggaran setelah perubahan sebesar Rp 64.464.057.299 terealisasi sebesar Rp 61.270.529.960 dengan rincian sebagaimana disajikan pada tabel 3.5

Tabel 3.5

Realisasi Anggaran Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun 2023

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Tidak Langsung			
1	Belanja Pegawai	-	-	-
2	Belanja Hibah	-	-	-
3	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
4	Belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota/pemerintahan desa	-	-	-
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ kab / kota/ pemerintahan desa dan partai politik	-	-	-
6.	Belanja tidak terduga	-	-	-
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	-	-	-
II	Belanja Operasi			
1.	Belanja pegawai	21.217.232.113	20.718.321.279	97,65
2.	Belanja Barang dan Jasa	36.812.482.932	32.674.143.265	88,76
3.	Belanja Modal	8.434.342.234	7.878.065.416	93,40



No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Jumlah Belanja Operasi	58.029.715.065	53.392.464.544	92,01
	TOTAL BELANJA	66.464.057.299	61.270.529.960	92,19

Sumber data : LRA Belanja Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023
(Realisasi Belanja sebelum audit BPK)

1.4.1 Permasalahan dan Solusi Pengelolaan Anggaran

Permasalahan utama pengelolaan anggaran belanja adalah terbatasnya alokasi dan akumulasi dana yang dikelola pemerintah daerah sebagai akibat masih relatif rendahnya proporsi PAD terhadap APBD Kabupaten Buleleng, sehingga sebagian besar sumber dana untuk membiayai pengeluaran/belanja berasal dari dana perimbangan, terutama dana alokasi umum dan dana perimbangan lainnya yang dialokasikan oleh pemerintah pusat.

Tingginya penyerapan dana untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, menyebabkan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagian besar terserap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Sehingga menyebabkan proporsi Belanja Daerah 60% untuk Belanja Operasi dan 40% untuk Belanja Tidak Langsung belum terpenuhi. Selain itu sebagai akibat dari terbatasnya kemampuan keuangan daerah maka untuk pemenuhan program dan kegiatan juga terbatas.

Belanja daerah dialokasikan dan dilaksanakan searah dengan prioritas program, kegiatan sesuai perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis). Belanja daerah dialokasikan secara efisien dan efektif guna mewujudkan sasaran kinerja.

Disamping itu, juga terdapat permasalahan-permasalahan secara umum dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

- Rendahnya pencapaian realisasi pengeluaran terutama di belanja modal disebabkan adanya perubahan di dalam regulasi/peraturan dalam pengadaan belanja modal;
- Tingkat pemahaman dan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi sehubungan dengan telah bergesernya paradigma pengelolaan keuangan daerah pada SKPD dalam pengelolaan keuangan daerah belum dipahami secara optimal;



- c. Kualitas sumber daya manusia/aparatur pemerintahan daerah belum memadai dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Upaya-upaya penanganan yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan koordinasi dengan instansi/pihak yang berkompeten untuk lebih mempercepat dan memperlancar proses pengadaan belanja modal;
- b. Melakukan pembinaan melalui konsultasi, fasilitasi, dan meningkatkan monitoring dan evaluasi kepada SKPD dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- c. Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis serta Kursus-kursus singkat Pengelolaan Keuangan Daerah, guna meningkatkan kualitas SDM khususnya Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing SKPD.

1.5 Prestasi yang Dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Pada tahun 2023 Sekretariat Kabupaten Buleleng, organisasi, kelompok, dan perorangan yang mewakili Kabupaten Buleleng telah mencapai prestasi dan mendapat penghargaan di tingkat internasional, Nasional, Regional, dan Provinsi Bali sebagai berikut.

No	Jenis Penghargaan	Tingkat	Penerima
1	2	3	4
1	Pemkab Buleleng menerima penghargaan Digitalisasi Arsip Kepegawaian Award yang diselenggarakan oleh Kantor Regional X BKN Denpasar. Pemkab Buleleng meraih predikat terbaik pertama diantara Instansi Wilayah Kantor Regional X BKN Denpasar.	Provinsi	BKPSDM
2	Pemkab Buleleng meraih penghargaan sebagai salah satu Kabupaten yang telah mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya cakupan kesehatan	Nasional	DINKES



	semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.		
3	Buleleng kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Raihan ini merupakan yang kesembilan secara berturut-turut.	Nasional	BPKPD
4	Pemkab Buleleng menerima Penghargaan Unit Kerja PBJ Proaktif untuk kategori Pemerintah Kabupaten. Penghargaan diberikan karena Buleleng telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan	Nasional	PPBJ
5	Pemkab Buleleng dianugerahi sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dan berhak atas Penghargaan Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2022. Pemkab Buleleng berhasil mencapai indeks IRH 92,2 dengan predikat AA (istimewa).	Nasional	ORGANISASI
6	Pemkab Buleleng berhasil meraih Opini Baik dalam Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022 oleh Ombudsman RI dengan nilai 93,80.	Nasional	ORGANISASI
7	Pemkab Buleleng meraih penghargaan Anubhawa Sasana dari Kemenkumham RI. Penghargaan yang diperoleh karena Pemkab Buleleng dinilai berhasil membina desa dan kelurahan yang sadar hukum.	Nasional	
8	Buleleng berhasil meraih Anugerah Meritokrasi tahun 2022 sebagai instansi pemerintah yang menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN dengan nilai	Nasional	BKPSDM



330,5 dan predikat sangat baik.

- | | | |
|----|---|----------|
| 9 | Kabupaten Buleleng berhasil meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Terbaik Wilayah Jawa-Bali. | Nasional |
| 10 | TPID Buleleng mendapatkan penghargaan Bali Kertha Buwana sebagai mitra pengendalian inflasi terkolaboratif wilayah Bali. Atas keberhasilan itu, Pemerintah Pusat menggelontor Dana Insentif Daerah (DID) Rp11,4 Miliar kepada Buleleng. | Nasional |



BAB IV P E N U T U P

Bab IV

Memuat

Simpulan umum

Langkah Perbaikan ke Depan

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran - sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci capaian kinerja berdasarkan evaluasi atas kinerja diberi predikat **Sangat Berhasil**, **Berhasil**, **Cukup**, **Kurang**, dan **Sangat Kurang** digambarkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Simpulan Capaian Kinerja Sasaran Berdasarkan Evaluasi Kinerja

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Persentase	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
1	2	3	4	5	6
1	Sangat Berhasil	2	242	2	242
2	Berhasil				
3	Cukup				
4	Kurang				



LKjIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG Tahun 2023

5	Sangat Kurang				
	Jumlah	2	242	2	242

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Tahun 2023 -2026 dan RENSTRA Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, khususnya untuk tahun anggaran 2023 sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kabupaten Buleleng, dan Perjanjian Kinerja Bupati Buleleng tanggal 2 Januari 2019, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui karena semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia.

4.2 Langkah Perbaikan ke Depan

Dalam rangka mengefektifkan budaya kinerja, maka ke depan akan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Memperbaiki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 2) Menggunakan aplikasi e-SAKIP agar pengukuran capaian kinerja baik tingkat Kabupaten maupun tingkat SKPD lebih terkendali dan termonitor dengan baik secara berkala.
- 3) Seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam menyusun Laporan Kinerja (LKj) akan diwajibkan menyajikan informasi capaian kinerja yang telah diperjanjikan disertai analisis dan evaluasi yang diperlukan, selain itu akan diwajibkan pula seluruh SKPD menyajikan informasi penyerapan anggaran yang terkait dengan pencapaian kerjanya disertai analisis atas efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kerjanya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai evaluasi capaian kinerja dan bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah, akan dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng khususnya Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan diterapkan dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan




LKJIP SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG *Tahun 2023*

daerah. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng ini bermanfaat.

Singaraja, 8 Januari 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng


Drs. Gede Suyasa, M.Pd
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670710 199203 1 014

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ESELON II																	
SEKRETARIS DAERAH																	
1	Terwujudnya LPPD yang berkualitas	1	Nilai LPPD	Angka/nilai	4.20	Triwulan I	100.00	27.35	27.35	Belum tercapai	Program Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat	10,393,466,800.00	Triwulan I	11,629,282,500.00	1,361,872,021.00	11.71	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	100.00	53.48	53.48	Belum tercapai			Triwulan II	11,820,448,900.00	3,606,878,996.00	30.51	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	-	-	-	Belum tercapai			Triwulan III	11,820,448,900.00	6,911,639,270.00	58.47	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	4.20	4.20	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	10,393,466,800.00	9,448,854,965.00	90.91	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
2	Terwujudnya Level Kematangan UKPJ	2	Level Kematangan UKPBJ	Level	Level 3	Triwulan I	2	2	100	Sudah tercapai	Program Perekonomian dan Pembangunan	3,086,632,300.00	Triwulan I	2,841,670,000.00	475,947,642.00	16.75	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	2	2	100	Sudah tercapai			Triwulan II	3,341,670,000.00	954,722,066.00	28.57	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	2	2	100	Sudah tercapai			Triwulan III	3,341,670,000.00	1,892,777,312.00	56.64	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	3	3	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	3,086,632,300.00	2,869,167,448.00	92.95	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
3	Terkendalinya inflasi daerah	2	Angka inflasi	Angka / inflasi	3.50	Triwulan I	3.50	1.27	0.36	Sudah tercapai	Program Perekonomian dan Pembangunan	-	Triwulan I	-	-	#DIV/0!	-
						Triwulan II	3.50	2.20	63	Sudah tercapai			Triwulan II	-	-	#DIV/0!	-
						Triwulan III	3.50	0.35	10	Sudah tercapai			Triwulan III	-	-	#DIV/0!	-
						Triwulan IV	3.50	0.59	17	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	#DIV/0!	-

4	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Daerah yang berkualitas.	5	Indek Reformasi Birokrasi	Angka / nilai	60.58	Triwulan I	100.00	22.43	22.43	Sudah tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	52,983,958,199.00	Triwulan I	49,762,994,374.00	8,737,261,396.00	17.56	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	100.00	47.36	47.36	Sudah tercapai			Triwulan II	55,965,794,291.00	18,967,981,734.00	33.89	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	-	-	-	Belum sampai tr.III			Triwulan III	55,965,794,291.00	34,085,747,153.00	60.90	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	60.58	-	-	Belum sampai tr.IV			Triwulan IV	52,983,958,199.00	48,952,507,547.00	92.39	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
TOTAL											66,464,057,299.00			61,270,529,960.00	92.19		

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)						
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ESELON III																
A KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN																
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Nilai LPPD	Angka/Nilai	4.21	Triwulan I	-	-	-	Belum tercapai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	2,294,215,600.00	Triwulan I	572,090,700.00	252,629,750.00	44.16	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	-	-	-	Belum tercapai			Triwulan II	3,252,607,500.00	727,369,140.00	22.36	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	-	-	-	Belum tercapai			Triwulan III	3,252,607,500.00	1,452,713,339.00	44.66	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	100	100	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	2,294,215,600.00	1,911,388,844.00	83.31	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON III																
B KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT																
2	Terwujudnya kebijakan Daerah dibidang Bina Mental dan Spritual sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.	2 Jumlah kebijakan daerah di bidang Bina Mental dan Spritual	Dokumen	2	Triwulan I	2	2	100	Sudah tercapai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6,226,943,400.00	Triwulan I	6,335,075,000.00	958,977,565.00	15.14	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	-	-	-	Sudah tercapai di tw I			Triwulan II	6,526,241,400.00	2,343,521,556.00	35.91	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	-	-	-	Sudah tercapai di tw I			Triwulan III	6,526,241,400.00	4,300,780,296.00	65.90	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	-	-	-	Sudah tercapai di tw I			Triwulan IV	6,226,943,400.00	5,883,968,216.00	94.49	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON III																
C KEPALA BAGIAN HUKUM																
3	Terwujudnya harmonisasi rancangan produk hukum daerah yang sesuai dengan perundang - undangan	3 Prosentase rancangan produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang - undangan	%	100	Triwulan I	-	-	-	Belum tercapai	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	1,872,307,800.00	Triwulan I	2,041,600,000.00	150,264,706.00	7.36	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	-	-	-	Belum tercapai			Triwulan II	2,041,600,000.00	535,988,300.00	26.25	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	50	50	100	Sudah tercapai			Triwulan III	2,041,600,000.00	1,158,145,635.00	56.73	Akan terealisasi pada Triwulan IV

					Triwulan IV	50	50	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,872,307,800.00	1,653,497,905.00	88.31	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
--	--	--	--	--	-------------	----	----	-----	----------------	--	--	-------------	------------------	------------------	-------	------------------------------------

ESELON III																	
D KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN																	
4	Terwujudnya koordinasi penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas bidang perekonomian, SDA dan administrasi pembangunan	4	Prosentase koordinasi penyusunan dan evaluasi kebijakan daerah dan pelaksanaan tugas bidang perekonomian, SDA dan administrasi pembangunan	%	100	Triwulan I	25	25	25	Sudah tercapai	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,985,969,300.00	Triwulan I	1,650,670,000.00	289,966,386.00	17.57	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	50	50	50	Sudah tercapai			Triwulan II	2,150,670,000.00	588,533,472.00	27.37	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	75	75	75	Sudah tercapai			Triwulan III	2,150,670,000.00	1,204,475,850.00	56.00	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	100	100	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,985,969,300.00	1,867,056,100.00	94.01	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON III																	
E KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA																	
5	Terwujudnya pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa yang akuntabel dan sesuai dengan peraturan yang berlaku	5	Prosentase capaian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	%	100	Triwulan I	25	25	25	Sudah tercapai	Program Perekonomian dan Pembangunan	1,100,663,000.00	Triwulan I	1,191,000,000.00	185,981,256.00	15.62	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	50	50	50	Sudah tercapai			Triwulan II	1,191,000,000.00	366,188,594.00	30.75	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	75	75	75	Sudah tercapai			Triwulan III	1,191,000,000.00	688,301,462.00	57.79	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	100	100	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,100,663,000.00	1,002,111,348.00	91.05	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON III																	
F KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN																	
6	Terwujudnya perencanaan, penatausahaan keuangan dan pelaporan SKPD	6	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Persen	100	Triwulan I	30	30	100	Belum tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	23,580,070,374.00	Triwulan I	25,421,994,374.00	4,235,914,377.00	16.66	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	-	-	-	Belum tercapai			Triwulan II	25,180,890,291.00	11,365,127,997.00	45.13	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	20	20	100	Belum tercapai			Triwulan III	25,180,890,291.00	16,811,065,331.00	66.76	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	50	50	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	23,580,070,374.00	22,923,119,463.00	97.21	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

ESELON III																	
G KEPALA BAGIAN ORGANISASI																	
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pelayanan publik	7	Jumlah kebijakan Daerah dibidang kelembagaan, ANJAB dan ABK, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan RB, yang terbit sesuai ketentuan.	Dokumen	26	Triwulan I	15	15	100	Sudah tercapai	Program Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	861,795,000.00	Triwulan I	938,000,000.00	158,683,880.00	16.92	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1	1	100	Sudah tercapai			Triwulan II	938,000,000.00	326,958,736.00	34.86	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	3	3	100	Sudah tercapai			Triwulan III	938,000,000.00	530,874,941.00	56.60	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	7	7	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	861,795,000.00	727,683,642.00	84.44	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON III																	
H KEPALA BAGIAN UMUM																	
8	Terwujudnya Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli yang sesuai ketentuan yang berlaku	8	Jumlah Laporan Penata Usahaan Pimpinan dan Staf Ahli dan Administrasi Kepegawaian	Laporan	12	Triwulan I	3	3	100	Sudah tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	22,067,673,725.00	Triwulan I	16,674,000,000.00	2,901,643,566.00	17.40	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	6	6	100	Sudah tercapai			Triwulan II	22,967,904,000.00	5,159,396,983.00	22.46	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	9	9	100	Sudah tercapai			Triwulan III	22,967,904,000.00	11,997,179,194.00	52.23	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	22,067,673,725.00	19,101,985,898.00	86.56	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON III																	
I KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN																	
9	Terwujudnya koordinasi pelaksana tugas perangkat daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	9	Jumlah koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang protokol, Komunikasi pimpinan dan dokumentasi pimpinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Laporan	12	Triwulan I	3	3	100	Sudah tercapai	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,474,419,100.00	Triwulan I	6,729,000,000.00	1,441,019,573.00	21.42	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	3	3	100	Sudah tercapai			Triwulan II	6,879,000,000.00	2,116,498,018.00	30.77	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	3	3	100	Sudah tercapai			Triwulan III	6,879,000,000.00	4,746,627,687.00	69.00	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	3	3	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	6,474,419,100.00	6,199,718,544.00	95.76	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
TOTAL												66,464,057,299.00		61,270,529,960.00	92.19		

**CAPAIAN RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Sasaran Kerja	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja						Anggaran (Rp)							
				Target Kinerja Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	Sub Kegiatan	Target Anggaran Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
A SUBSTANSI. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN																	
1	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan presentase sesuai standar nasional	1	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	2	Triwulan I	-	-	0.00	Belum Tercapai	Penataan Administrasi Pemerintahan	738,188,464.00	Triwulan I	959,875,000.00	147,913,008.00	15.41	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	-	-	0.00	Belum Tercapai			Triwulan II	959,875,000.00	253,302,345.00	26.39	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	-	-	0.00	Belum Tercapai			Triwulan III	959,875,000.00	427,405,304.00	44.53	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	2	2	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	738,188,464.00	576,948,867.00	78.16	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
B SUBSTANSI. ADMINISTRASI WILAYAH																	
1	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan presentase sesuai standar nasional	1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Laporan	16	Triwulan I	3	3	100.00	Sudah tercapai	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	408,093,989.00	Triwulan I	736,575,000.00	55,445,478.00	7.53	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	3	3	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	736,575,000.00	110,766,430.00	15.04	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	5	5	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	736,575,000.00	228,514,584.00	31.02	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	5	5	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	408,093,989.00	325,328,662.00	79.72	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
C SUBSTANSI KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH																	
1	Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan presentase sesuai standar nasional	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen	6	Triwulan I	1	1	100.00	Sudah tercapai	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	782,630,900.00	Triwulan I	986,750,000.00	1,875,000.00	0.19	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	986,750,000.00	265,082,500.00	26.86	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	2	2	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	986,750,000.00	563,976,450.00	57.15	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	2	2	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	782,630,900.00	697,851,450.00	89.17	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

2	Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah	2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen	32	Triwulan I			#DIV/0!	Belum Tercapai	Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri	265,428,912.00	Triwulan I	395,157,500.00	43,826,264.00	11.09	Akan terealisasi pada Triwulan II	
						Triwulan II			#DIV/0!	Belum Tercapai			Triwulan II	395,157,500.00	90,407,865.00	22.88	Akan terealisasi pada Triwulan III	
						Triwulan III			#DIV/0!	Sudah tercapai			Triwulan III	395,157,500.00	166,363,751.00	42.10	Akan terealisasi pada Triwulan IV	
						Triwulan IV			#DIV/0!	Sudah tercapai			Triwulan IV	265,428,912.00	230,097,215.00	86.69	Sudah terealisasi pada Triwulan IV	
3	Jumlah Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama Daerah	3	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan	1	Triwulan I	-	-	0.00	Belum Tercapai	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	99,873,335.00	Triwulan I	174,250,000.00	3,570,000.00	2.05	Akan terealisasi pada Triwulan II	
						Triwulan II	-	-	0.00	Belum Tercapai			Triwulan II	174,250,000.00	7,810,000.00	4.48	Akan terealisasi pada Triwulan III	
						Triwulan III	-	-	0.00	Sudah tercapai			Triwulan III	174,250,000.00	66,453,250.00	38.14	Akan terealisasi pada Triwulan IV	
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	99,873,335.00	81,162,650.00	81.27	Sudah terealisasi pada Triwulan IV	
D SUBSTANSIFASILITASI PENGELOLAAN BINA MENTAL SPIRITUAL																		
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Upacara Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual	Dokumen	-	Triwulan I	-	-	-	Belum Tercapai	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual.	4,960,620,400.00	Triwulan I	5,041,750,000.00	787,043,556.00	15.61	Akan terealisasi pada Triwulan II	
						Triwulan II	-	-	-	Belum Tercapai			Triwulan II	5,232,916,400.00	1,899,309,606.00	36.30	Akan terealisasi pada Triwulan III	
						Triwulan III	-	-	-	Belum Tercapai			Triwulan III	5,232,916,400.00	3,392,600,898.00	64.83	Akan terealisasi pada Triwulan II	
						Triwulan IV	-	-	-	Sudah tercapai			Triwulan IV	4,960,620,400.00	4,646,738,369.00	93.67	Sudah terealisasi pada Triwulan IV	
		2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spritual yg meliputi Sarana/Prasarana Upacara dan dibidang Keagamaan Lainnya	%	100	Triwulan I	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan I					
						Triwulan II	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II					
						Triwulan III	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III					
						Triwulan IV	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV					
E SUBSTANSI. PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN SOSIAL																		
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Upacara Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	%	100	Triwulan I	25	25	100.00	Sudah tercapai	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	863,383,500.00	Triwulan I	865,887,500.00	109,228,171.00	12.61	Akan terealisasi pada Triwulan II	
						Triwulan II	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	865,887,500.00	325,403,535.00	37.58	Akan terealisasi pada Triwulan III	
						Triwulan III	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	865,887,500.00	629,736,703.00	72.73	Akan terealisasi pada Triwulan IV	
						Triwulan IV	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	863,383,500.00	851,517,509.00	98.63	Sudah terealisasi pada Triwulan IV	

F SUBSTANSI. PELAKSANAAN KEBIJAKAN, EVALUASI DAN CAPAIAN KINERJA TERKAIT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT																	
1	Jumlah Dokumen Kebijakan Daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Upacara Daerah	1	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kemasyarakatan Lainnya	%	100	Triwulan I	25	25	100.00	Sudah tercapai	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	402,939,500.00	Triwulan I	427,437,500.00	62,705,508.00	14.67	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	427,437,500.00	118,808,415.00	27.80	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	427,437,500.00	278,442,695.00	65.14	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	25	25	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	402,939,500.00	385,712,338.00	95.72	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
G SUBSTANSI. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN																	
1	Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	1	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen	6	Triwulan I	-	-	0.00	Belum tercapai	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	719,199,631.00	Triwulan I	778,871,747.00	65,382,718.00	8.39	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	2	2	100.00	Belum tercapai			Triwulan II	778,871,747.00	222,135,795.00	28.520	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	2	2	100.00	Belum tercapai			Triwulan III	778,871,747.00	474,997,016.00	60.99	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	2	2	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	719,199,631.00	671,674,770.00	93.39	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
H SUBSTANSI BANTUAN HUKUM																	
2	Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	2	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus	5	Triwulan I	1	1	100.00	Sudah tercapai	Fasilitasi Bantuan Hukum	748,911,975.00	Triwulan I	831,598,957.00	50,108,844.00	6.03	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	831,598,957.00	220,343,730.00	26.50	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	831,598,957.00	451,337,603.00	54.27	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	2	2	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	748,911,975.00	646,611,129.00	86.34	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
I SUBSTANSI DOKUMENTASI DAN INFORMASI																	
3	Prosentase produk hukum daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan	3	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang di Dokumentasi	Dokumen	3	Triwulan I	-	-	0.00	Belum tercapai	Pendokumentasian Produk Hukum dan pengelolaan Informasi Hukum	404,196,194.00	Triwulan I	431,129,296.00	34,773,144.00	8.07	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	431,129,296.00	93,508,775.00	21.69	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	431,129,296.00	231,811,016.00	53.77	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	404,196,194.00	335,212,006.00	82.93	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
J SUBSTANSI. PEREKONOMIAN																	
1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	16	Triwulan I	16	4	25.00	Belum tercapai	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	247,695,000.00	Triwulan I	227,695,000.00	30,255,642.00	13.29	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	16	8	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	227,695,000.00	81,741,820.00	35.90	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	16	12	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	227,695,000.00	164,357,426.00	72.18	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	16	16	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	247,695,000.00	223,420,068	90.20	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

2	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	381,200,000.00	Triwulan I	313,750,000.00	72,687,057.00	23.17	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							
		2	Jumlah Laporan Infasi Daerah	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai							
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1	Pelaksanaan Pameran dan Laporan TPAKD	Dokumen	4	Triwulan I	4	1	25.00	Belum tercapai	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi mikro kecil	400,790,000.00	Triwulan I	424,400,000.00	35,271,483.00	8.31	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	4	2	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	4	3	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	4	4	100.00	Sudah tercapai							
		2	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Micro Kecil	Dokumen	-	Triwulan I	-	-	0.00	Belum tercapai							
						Triwulan II	-	-	0.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	-	-	0.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah tercapai							
K SUBSTANSI. PEMBANGUNAN																	
1	Laporan Koordinasi Pembinaan Pembangunan	1	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	587,350,000.00	Triwulan I	357,700,000.00	70,347,880.00	19.67	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							
L SUBSTANSI. SUMBER DAYA ALAM																	
1	Laporan Pembangunan Wilayah Sumber Daya Alam	1	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	368,934,300.00	Triwulan I	327,125,000.00	81,404,324.00	24.88	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							

M SUBSTANSI. PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA																	
1	Prosentase kualitas pengadaan barang dan jasa	1	Data inventarisasi paket-paket pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	Triwulan I	1	1	100.00	Sudah tercapai	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	479,093,000.00	Triwulan I	466,500,000.00	81,815,214.00	17.54	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai							
		2	Laporan monitoring dan evaluasi pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai							
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							
		3	Laporan penyusunan dan pengelolaan katalog lokal atau sektoral	Dokumen	1	Triwulan I	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai							
		4	Laporan penyusunan strategi pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1	Triwulan I	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai							
		5	Laporan riset dan analisa pasar barang dan jasa	Dokumen	1	Triwulan I	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan II	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai							
		6	Persentase cakupan layanan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan	%	100	Triwulan I	100	100	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan II	100	100	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan III	100	100	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan IV	100	100	100.00	Sudah tercapai							
		7	Persentase penetapan pemenang sesuai jumlah paket pengadaan diumumkan pada aplikasi SIRUP	%	100	Triwulan I	100	7.35	7.35	Belum tercapai							
						Triwulan II	100	35.19	35.19	Belum tercapai							
						Triwulan III	100	92.86	92.86	Belum tercapai							
						Triwulan IV	100	91.84	91.84	Sudah tercapai							
8	Persentase pengelolaan dokumen hasil tender sesuai kaidah kearsipan	%	100	Triwulan I	100	100	100.00	Sudah tercapai									
				Triwulan II	100	100	100.00	Sudah tercapai									
				Triwulan III	100	100	100.00	Sudah tercapai									
				Triwulan IV	100	100	100.00	Sudah tercapai									
N SUBSTANSI. PENGELOLAAN PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK																	
2	Prosentase kualitas pengadaan barang dan jasa	1	Data barang dan jasa hasil pengadaan	Dokumen	1	Triwulan I	1	1	100.00	Belum tercapai	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	263,000,000.00	Triwulan I	307,900,000.00	60,557,332.00	19.67	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1	0.50	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	1	0.80	80.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai							
		2	Data pelayanan informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada masyarakat	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai							
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							
		3	Jumlah layanan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi	Pengguna	150	Triwulan I	150	50	33.33	Belum tercapai							
						Triwulan II	150	70	46.67	Belum tercapai							
						Triwulan III	150	108	72.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	150	150	100.00	Sudah tercapai							
		4	Laporan manajemen barang dan jasa hasil pengadaan	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum tercapai							
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum tercapai							
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum tercapai							
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai							
5	Persentase kualitas pelayanan pengguna	%	100	Triwulan I	100	-	0.00	Belum tercapai									
				Triwulan II	100	-	0.00	Belum tercapai									
				Triwulan III	100	-	0.00	Belum tercapai									
				Triwulan IV	100	-	0.00	Belum tercapai									

P SUBSTANSI. PERENCANAAN																	
1	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	Triwulan I	7	2	28.57	Belum Tercapai	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	735,665,885.00	Triwulan I	754,728,000.00	122,886,091.00	16.28	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	7	3	42.86	Belum Tercapai			Triwulan II	754,728,000.00	238,946,283.00	31.66	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	7	5	71.43	Belum Tercapai			Triwulan III	754,728,000.00	433,663,311.00	57.46	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	7	7	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	735,665,885.00	700,501,182.00	95.22	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
2	Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan penunjang operasional KDH dan WKDH	2	Prosentase kelancaran administrasi keuangan dan penunjang operasional KDH dan WKDH	Bulan	12	Triwulan I	-	-	0.00	Belum Tercapai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Triwulan I	102,522,000.00	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	-	-	0.00	Belum Tercapai			Triwulan II	102,522,000.00	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	-	-	0.00	Belum Tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
					12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum Tercapai	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	699,674,190.00	Triwulan I	750,000,000.00	187,500,000.00	25.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum Tercapai			Triwulan II	750,000,000.00	312,500,000.00	41.67	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum Tercapai			Triwulan III	750,000,000.00	532,400,000.00	70.99	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	699,674,190.00	639,300,000.00	91.37	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
3	Prosentase kelancaran administrasi keuangan Sekretariat Daerah	3	Prosentase kelancaran administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Bulan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum Tercapai	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20,517,557,943.00	Triwulan I	22,141,401,874.00	364,106,334.00	1.64	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum Tercapai			Triwulan II	21,900,297,791.00	10,290,186,332.00	46.99	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum Tercapai			Triwulan III	21,900,297,791.00	15,463,154,652.00	70.61	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	20,517,557,943.00	20,079,021,279.00	97.86	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
Q SUBSTANSI. KEUANGAN																	
1	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan	1	Prosentase kelancaran administrasi keuangan Sekretariat Daerah	Dokumen	12	Triwulan I	12	3	25.00	Sudah tercapai	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	973,056,761.00	Triwulan I	962,620,000.00	165,681,849.00	17.21	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Sudah tercapai			Triwulan II	962,620,000.00	294,391,624.00	30.58	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12	9	75.00	Sudah tercapai			Triwulan III	962,620,000.00	612,984,510.00	63.68	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	973,056,761.00	903,942,242.00	92.90	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
2	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan Keuangan	2	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum Tercapai	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	222,199,920.00	Triwulan I	236,102,500.00	45,710,621.00	19.36	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum Tercapai			Triwulan II	236,102,500.00	84,337,090.00	35.72	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum Tercapai			Triwulan III	236,102,500.00	158,690,458.00	67.21	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	222,199,920.00	206,179,634.00	92.79	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

R SUBSTANSI. PELAPORAN																	
1	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	1	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	Triwulan I	3	3	100	Belum Tercapai	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	431,915,675.00	Triwulan I	474,620,000.00	72,029,482.00	15.18	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	3	3	100	Belum Tercapai			Triwulan II	474,620,000.00	144,766,668.00	30.50	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	3	3	100	Belum Tercapai			Triwulan III	474,620,000.00	274,337,869.00	57.80	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	3	3	100	Sudah tercapai			Triwulan IV	431,915,675.00	394,175,126.00	91.26	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

S SUBSTANSI. KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI																	
1	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	1	Jumlah Dokumen LKJIP, RKT, PK, PK Perubahan, Rencana Aksi atas PK, Capaian Rencana Aksi Atas PK Perubahan, Rencana Aksi atas PK, Daerah yang tepat waktu	Dokumen	20.00	Triwulan I	20	5	25.00	Belum Tercapai	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	313,693,752.00	Triwulan I	377,713,752.00	44,789,440.00	11.86	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	20	10	50.00	Belum Tercapai			Triwulan II	377,713,752.00	130,462,800.00	34.54	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	20	15	75.00	Belum Tercapai			Triwulan III	377,713,752.00	202,589,701.00	53.64	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	20	20	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	313,693,752.00	255,852,485.00	81.56	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
T SUBSTANSI. PELAYANAN PUBLIK DAN TATA LAKSANA																	
1	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	1	Jumlah Dokumen IKM Setda, Jumlah Laporan Evaluasi SOP, Jumlah Laporan Pembinaan dan Budaya Kerja Prima pada Pemerintahan Daerah, Jumlah Laporan Pembinaan dan Monev Pelayanan Publik, Jumlah Laporan Standar	Laporan	3.00	Triwulan I	3	-	0.00	Belum Tercapai	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	261,122,637.00	Triwulan I	254,877,637.00	45,648,224.00	17.91	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	3	1	33.33	Belum Tercapai			Triwulan II	254,877,637.00	82,636,284.00	32.42	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	3	2	66.67	Sudah tercapai			Triwulan III	254,877,637.00	154,808,375.00	60.74	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	3	3	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	261,122,637.00	216,586,430.00	82.94	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
U SUBSTANSI. KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN																	
1	Indeks Reformasi Birokrasi Daerah	1	Jumlah Dokumen ANJAB dan ABK	Dokumen	2.00	Triwulan I	2	-	0.00	Belum Tercapai	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	286,978,611.00	Triwulan I	305,408,611.00	68,246,216.00	22.35	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	2	-	0.00	Belum Tercapai			Triwulan II	305,408,611.00	113,859,652.00	37.28	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	2	1	50.00	Belum Tercapai			Triwulan III	305,408,611.00	173,476,865.00	56.80	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	2	2	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	286,978,611.00	255,244,727.00	88.94	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
ESELON IV																	
V KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN																	
	Persentase terlayannya administrasi dan operasional kepegawaian pada Sekretariat	1	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang ditindaklanjuti	Stel	155.00	Triwulan I	155.00	0.00	0.00	Belum Tercapai	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	Triwulan I	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	155.00	45.00	29.03	Belum Tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	155.00	0.00	0.00	Belum Tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	148.00	147.00	99.32	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
	Persentase terlayannya administrasi dan operasional kepegawaian pada Sekretariat	2	Jumlah ASN lingkup Setda Kabupaten Buleleng yang update	Stel	150.00	Triwulan I	150	146	97.33	Sudah tercapai	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36,948,047.00	Triwulan I	35,000,000.00	8,175,000.00	23.36	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	150	153	102.00	Sudah tercapai			Triwulan II	35,000,000.00	10,700,000.00	30.57	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	150	148	98.67	Sudah tercapai			Triwulan III	35,000,000.00	19,900,000.00	56.86	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	150	147	98.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	36,948,047.00	28,750,000.00	77.81	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
	Persentase pelayanan administrasi dan operasional perkantoran pada Sekretariat	3	Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	Triwulan I	-	-	0.00	Belum tercapai	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	-	Triwulan I	-	-	0.00	-
						Triwulan II	-	-	0.00	Belum tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	-
						Triwulan III	-	-	0.00	Belum tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	-
						Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	-

1	Persentase pelayanan administrasi dan operasional perkantoran pada Sekretariat	4	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	12	Triwulan I	4	-	0.00	Belum tercapai	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	Triwulan I	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	4	2	50.00	Sudah tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	4	2	50.00	Sudah tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
	Persentase pelayanan administrasi dan operasional perkantoran pada Sekretariat	5	Terlaksananya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Eksemplar	5	Triwulan I	4,572	762	16.67	Belum tercapai	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	179,011,158.00	Triwulan I	177,283,158.00	38,958,384.00	21.98	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	4,572	2,286	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	177,283,158.00	63,745,980.00	35.96	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	4,572	3,429	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	177,283,158.00	122,768,364.00	69.25	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	4,572	4,572	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	179,011,158.00	177,049,152.00	98.90	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
	Persentase pelayanan administrasi dan operasional perkantoran pada Sekretariat	6	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Orang/ Hari	865	Triwulan I	865	39	4.51	Belum tercapai	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	682,449,075.00	Triwulan I	1,087,991,075.00	175,007,002.00	16.09	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	865	108	12.49	Belum tercapai			Triwulan II	1,087,991,075.00	185,811,517.00	17.08	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	865	275	31.79	Belum tercapai			Triwulan III	1,087,991,075.00	367,599,877.00	33.79	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	713	680	95.37	Belum tercapai			Triwulan IV	682,449,075.00	518,940,470.00	76.04	Persentase realisasi masih rendah
	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	7	Tersedianya Pelayanan Surat Menyurat	Eksemplar	27,000	Triwulan I	27,000	2,745	10.17	Belum tercapai	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	439,519,970.00	Triwulan I	479,627,410.00	105,408,831.00	21.98	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	27,000	13,310	49.30	Belum tercapai			Triwulan II	479,627,410.00	163,969,977.00	34.19	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	27,000	18,523	68.60	Belum tercapai			Triwulan III	479,627,410.00	302,571,847.00	63.08	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	27,000	26,620	98.59	Sudah tercapai			Triwulan IV	439,519,970.00	423,194,519.00	96.29	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

X SUBSTANSI. PERLENGKAPAN																
Persentase pelayanan administrasi dan operasional perkantoran pada Sekretariat	1	Terlaksananya Penerangan Lingkungan Kantor Memadai	Jenis	49.00	Triwulan I	49	8.00	16.33	Belum tercapai	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	327,390,782.00	Triwulan I	190,220,867.00	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	49	13.00	26.53	Belum tercapai			Triwulan II	248,458,571.00	34,633,500.00	13.94	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	49	42	85.71	Belum tercapai			Triwulan III	248,458,571.00	119,205,500.00	47.98	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	49	49	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	327,390,782.00	315,411,300.00	96.34	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	2	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Unit	11	Triwulan I	-	-	#DIV/0!	Belum tercapai	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	Triwulan I	-	-	0.00	-
					Triwulan II	-	-	#DIV/0!	Sudah tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	-
					Triwulan III	-	-	#DIV/0!	Sudah tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	-
					Triwulan IV	-	-	#DIV/0!	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	-
Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	3	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan dinas Operasional/ Lapangan	Unit	5	Triwulan I	1	-	0.00	Belum tercapai	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Triwulan I	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	1	-	0.00	Belum tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	5	5	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	5	5	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	4	Terlaksananya Pengadaan Mebel	Unit	43	Triwulan I	43	-	0.00	Belum tercapai	Pengadaan Mebel	1,171,755,000.00	Triwulan I	278,055,000.00	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	43	35	81.40	Belum tercapai			Triwulan II	1,499,055,000.00	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	43	38	88.37	Belum tercapai			Triwulan III	1,499,055,000.00	918,050,900.00	61.24	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	43	43	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,171,755,000.00	1,028,050,900.00	87.74	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	5	Jumlah pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas	Unit	160	Triwulan I	106	-	0.00	Belum tercapai	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,481,532,952.00	Triwulan I	1,809,044,700.00	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	106	39	36.79	Belum tercapai			Triwulan II	4,992,857,700.00	1,376,398,500.00	27.57	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	106	102	96.23	Belum tercapai			Triwulan III	4,992,857,700.00	2,652,828,470.00	53.13	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	160	156	97.50	Sudah tercapai			Triwulan IV	5,481,532,952.00	5,106,067,555.00	93.15	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
Persentase terlaksananya pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	6	Terlaksananya pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	222	Triwulan I	222	-	0.00	Belum tercapai	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1,444,581,080.00	Triwulan I	274,614,000.00	17,764,440.00	6.47	Akan terealisasi pada Triwulan II
					Triwulan II	222	125	56.31	Belum tercapai			Triwulan II	2,025,834,000.00	66,491,220.00	3.28	Akan terealisasi pada Triwulan III
					Triwulan III	222	185	83.33	Belum tercapai			Triwulan III	2,025,834,000.00	1,225,945,580.00	60.52	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	222	222	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,444,581,080.00	1,374,037,580.00	95.12	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

1	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	7	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis Belanja	63	Triwulan I	63	10	15.87	Belum tercapai	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1,185,548,375.00	Triwulan I	1,237,723,091.00	195,554,640.00	15.80	Akan terealisasi pada Triwulan II
	Triwulan II	63	25	39.68	Belum tercapai	Triwulan II	1,237,723,091.00	356,129,345.00	28.77	Akan terealisasi pada Triwulan III							
	Triwulan III	63	48	76.19	Belum tercapai	Triwulan III	1,237,723,091.00	717,969,324.00	58.01	Akan terealisasi pada Triwulan IV							
	Triwulan IV	63	63	100.00	Sudah tercapai	Triwulan IV	1,185,548,375.00	948,296,682.00	79.99	Sudah terealisasi pada Triwulan IV							
	Persentase terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	8	Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Unit	11.00	Triwulan I	11	2	18.18	Belum tercapai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1,157,914,098.00	Triwulan I	1,191,972,708.00	332,417,253.00	27.89	Akan terealisasi pada Triwulan II
	Triwulan II	11	6	54.55	Belum tercapai	Triwulan II	1,191,972,708.00	362,336,913.00	30.40	Akan terealisasi pada Triwulan III							
	Triwulan III	11	9	81.82	Belum tercapai	Triwulan III	1,191,972,708.00	590,125,902.00	49.51	Akan terealisasi pada Triwulan IV							
	Triwulan IV	11	11	100.00	Sudah tercapai	Triwulan IV	1,157,914,098.00	906,600,578.00	78.30	Sudah terealisasi pada Triwulan IV							
	Persentase terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	9	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	47.00	Triwulan I	47.00	8.00	17.02	Belum tercapai	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1,591,280,638.00	Triwulan I	1,653,893,788.00	352,956,616.00	21.34	Akan terealisasi pada Triwulan II
	Triwulan II	47.00	23.00	48.94	Belum tercapai	Triwulan II	1,653,893,788.00	419,882,793.00	25.39	Akan terealisasi pada Triwulan III							
	Triwulan III	47.00	40.00	85.11	Belum tercapai	Triwulan III	1,653,893,788.00	727,419,089.00	43.98	Akan terealisasi pada Triwulan IV							
	Triwulan IV	47.00	47.00	100.00	Sudah tercapai	Triwulan IV	1,591,280,638.00	1,248,533,372.00	78.46	Sudah terealisasi pada Triwulan IV							
	Persentase terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	10	Terpeliharanya Mebel	Unit	100	Triwulan I	100	-	0.00	Belum tercapai	Pemeliharaan Mebel	55,750,000.00	Triwulan I	55,750,000.00	9,335,100.00	16.74	Akan terealisasi pada Triwulan II
	Triwulan II	100	50	50.00	Belum tercapai	Triwulan II	55,750,000.00	9,335,100.00	16.74	Akan terealisasi pada Triwulan III							
	Triwulan III	100	63	63.00	Belum tercapai	Triwulan III	55,750,000.00	21,217,430.00	38.06	Akan terealisasi pada Triwulan IV							
	Triwulan IV	100	100	100.00	Sudah tercapai	Triwulan IV	55,750,000.00	35,116,850.00	62.99	Sudah terealisasi pada Triwulan IV							
	Persentase terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	11	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis Belanja	49	Triwulan I	49	8	16.33	Belum tercapai	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	640,595,620.00	Triwulan I	612,059,620.00	117,502,820.00	19.20	Akan terealisasi pada Triwulan II
	Triwulan II	49	24	48.98	Belum tercapai	Triwulan II	661,685,620.00	149,462,556.00	22.59	Akan terealisasi pada Triwulan III							
	Triwulan III	49	38	77.55	Belum tercapai	Triwulan III	661,685,620.00	303,778,065.00	45.91	Akan terealisasi pada Triwulan IV							
	Triwulan IV	49	49	100.00	Sudah tercapai	Triwulan IV	640,595,620.00	457,325,726.00	71.39	Sudah terealisasi pada Triwulan IV							
Persentase terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	12	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Lokasi	4.00	Triwulan I	4.00	4.00	100.00	Sudah tercapai	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1,997,233,910.00	Triwulan I	1,311,856,778.00	274,742,418.00	20.94	Akan terealisasi pada Triwulan II	
Triwulan II	4.00	4.00	100.00	Sudah tercapai	Triwulan II	1,350,864,074.00	375,816,516.00	27.82	Akan terealisasi pada Triwulan III								
Triwulan III	4.00	4.00	100.00	Sudah tercapai	Triwulan III	1,350,864,074.00	725,985,627.00	53.74	Akan terealisasi pada Triwulan IV								
Triwulan IV	4.00	4.00	100.00	Sudah tercapai	Triwulan IV	1,997,233,910.00	1,778,333,048.00	89.04	Sudah terealisasi pada Triwulan IV								
Persentase terpeliharanya barang milik daerah Penunjang Urusan	13	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung	Jenis Belanja	83.00	Triwulan I	83.00	14.00	16.87	Belum tercapai	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Gedung	230,611,475.00	Triwulan I	231,774,875.00	46,340,712.00	19.99	Akan terealisasi pada Triwulan II	
				Triwulan II	83.00	42.00	50.60	Belum tercapai	Triwulan II			231,774,875.00	58,126,117.00	25.08	Akan terealisasi pada Triwulan III		

Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	IV	Kantor dan Bangunan Lainnya	Belum tercapai	62.00	Triwulan III	83.00	62.00	74.70	Belum tercapai	Kantor atau Bangunan Lainnya	239,611,475.00	Triwulan III	231,774,875.00	138,089,936.00	59.58	Akan terealisasi pada Triwulan IV
					Triwulan IV	83.00	83.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	239,611,475.00	219,311,128.00	91.53	Sudah terealisasi pada Triwulan IV

Y SUBSTANSI. RUMAH TANGGA																	
1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	Bulan/Tahun	12.00	Triwulan I	12.00	2.00	16.67	Belum tercapai	Fasilitas Kunjungan Tamu	1,793,606,880.00	Triwulan I	2,267,214,880.00	382,857,000.00	16.89	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12.00	6.00	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	2,267,214,880.00	354,483,500.00	15.64	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12.00	9.00	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	2,267,214,880.00	818,722,500.00	36.11	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12.00	12.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,793,606,880.00	1,391,097,300.00	77.56	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
2	Persentase tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Sekretariat Daerah yang baik	2	Jumlah Rekening Air, Telepon, Listrik dan TV Berlangganan	Rekening	756.00	Triwulan I	756.00	189.00	25.00	Belum tercapai	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,209,676,000.00	Triwulan I	1,256,976,800.00	292,102,792.00	23.24	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	756.00	378.00	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	1,256,976,800.00	423,473,846.00	33.69	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	756.00	567.00	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	1,256,976,800.00	737,790,364.00	58.70	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	756.00	756.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,209,676,000.00	1,011,828,735.00	83.64	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
3	Persentase tersedianya pakaian dinas operasional KDH/WKDH	3	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya yang ditindaklanjuti	Stel	75.00	Triwulan I	70.00	0.00	0.00	Belum tercapai	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	Triwulan I	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	70.00	70.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	70.00	70.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan IV	75.00	71.00	94.67	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan III
3	Persentase tersedianya Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah	3	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Kepala Daerah	Bulan/Tahun	12.00	Triwulan I	12.00	3.00	25.00	Belum tercapai	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1,363,363,965.00	Triwulan I	1,372,941,250.00	303,680,212.00	22.12	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12.00	6.00	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	1,372,941,250.00	567,334,576.00	41.32	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12.00	9.00	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	1,372,941,250.00	825,832,086.00	60.15	Sudah terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan IV	12.00	12.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,363,363,965.00	1,312,727,294.00	96.29	Sudah terealisasi pada Triwulan III
4	Persentase tersedianya Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah	4	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Bulan/Tahun	12.00	Triwulan I	12.00	3.00	25.00	Belum tercapai	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	-	Triwulan I	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12.00	6.00	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	-	-	0.00	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12.00	9.00	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan IV	12.00	12.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	-	-	0.00	Sudah terealisasi pada Triwulan III
5	Persentase tersedianya Fasilitas Kerumahtanggan Sekretariat Daerah, Kepala Daerah	5	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Operasional dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Bulan/Tahun	12.00	Triwulan I	12.00	3.00	25.00	Belum tercapai	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	1,089,904,700.00	Triwulan I	1,141,000,000.00	248,840,346.00	21.81	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12.00	6.00	50.00	Belum tercapai			Triwulan II	1,141,000,000.00	428,735,795.00	37.58	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12.00	9.00	75.00	Belum tercapai			Triwulan III	1,141,000,000.00	580,839,053.00	50.91	Sudah terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan IV	12.00	12.00	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	1,089,904,700.00	821,313,709.00	75.36	Sudah terealisasi pada Triwulan III

ESELON IV																	
Z KASUBBAG PROTOKOL																	
1	Prosentase pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlayani dengan baik	1	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	12	Triwulan I	12	3	25.00	Belum Tercapai	Fasilitasi Keprotokolan	2,477,119,000.00	Triwulan I	2,610,000,000.00	610,750,836.00	23.40	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	12	6	50.00	Belum Tercapai			Triwulan II	2,610,000,000.00	957,445,231.00	36.68	Akan terealisasi pada Triwulan III
						Triwulan III	12	9	75.00	Belum Tercapai			Triwulan III	2,610,000,000.00	1,986,593,185.00	76.11	Akan terealisasi pada Triwulan IV
						Triwulan IV	12	12	100.00	Sudah tercapai			Triwulan IV	2,477,119,000.00	2,414,699,377.00	97.48	Sudah terealisasi pada Triwulan IV
Z.a SUBSTANSI. KOMUNIKASI PIMPINAN																	
1	Prosentase pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlayani dengan baik	1	Jumlah tabloid kabar buleleng	Eksemplar	13,200	Triwulan I	13,200	3,300	25.00	Belum Tercapai	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1,055,186,600.00	Triwulan I	1,154,000,000.00	202,066,443.00	17.51	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	13,200	6,600	50.00	Belum Tercapai							
						Triwulan III	13,200	9,900	75.00	Belum Tercapai							
						Triwulan IV	13,200	13,200	100.00	Sudah tercapai							
		2	Jumlah Buku klipng media	Buku	1,460	Triwulan I	365	360	98.63	Belum Tercapai							
						Triwulan II	1,460	724	49.59	Belum Tercapai							
						Triwulan III	1,460	1,092	74.79	Belum Tercapai							
						Triwulan IV	1,460	1,460	100.00	Sudah tercapai							
		3	Jumlah Baliho	Media	121	Triwulan I	121	10	8.26	Belum Tercapai							
						Triwulan II	121	40	33.06	Belum Tercapai							
						Triwulan III	121	57	47.11	Belum Tercapai							
						Triwulan IV	121	121	100.00	Sudah tercapai							
		4	Jumlah video dokumenter	Video Dokumenter	1	Triwulan I	1	-	0.00	Belum Tercapai							
						Triwulan II	1	1	100.00	Belum Tercapai							
						Triwulan III	1	1	100.00	Sudah tercapai							
						Triwulan IV	1	1	100.00	Sudah tercapai							
Z.b SUBSTANSI. DOKUMENTASI																	
1	Prosentase pelaksanaan keprotokolan dan komunikasi pimpinan yang terlayani dengan baik	1	Jumlah liputan dan pemberitaan dengan wartawan	Rilis Berita	1,000	Triwulan I	1,000	300	30.00	Belum Tercapai	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2,942,113,500.00	Triwulan I	2,965,000,000.00	628,202,294.00	21.19	Akan terealisasi pada Triwulan II
						Triwulan II	1,000	500	50.00	Belum Tercapai							
						Triwulan III	1,000	900	90.00	Belum Tercapai							
						Triwulan IV	1,000	1,000	100.00	Sudah tercapai							
		2	Jumlah liputan dan pemberitaan pembangunan, pemerintahan dan kemasarakatan	Liputan	550	Triwulan I	550	138	25.09	Belum Tercapai							
						Triwulan II	550	263	47.82	Belum Tercapai							
						Triwulan III	550	521	94.73	Belum Tercapai							
						Triwulan IV	550	550	100.00	Sudah tercapai							
		3	Jumlah publikasi pembangunan, pemerintahan dan kemasarakatan dengan media massa	Publikasi	1,000	Triwulan I	1,000	235	23.50	Belum Tercapai							
						Triwulan II	1,000	619	61.90	Belum Tercapai							
						Triwulan III	1,000	962	96.20	Belum Tercapai							
						Triwulan IV	1,000	1,000	100.00	Sudah tercapai							
TOTAL											66,464,057,299.00			61,270,529,960.00	92.19		

